



PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH DI DESA SARIWANGI KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Erna Destiawati¹⁾

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan ditandai dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan sarana pengelolaan, serta meningkatnya volume sampah rumah tangga setiap tahun. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Pemerintah Desa Sariwangi menginisiasi pengelolaan sampah dengan ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, serta kebijakan daerah Kabupaten Bandung Barat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan teori Upaya Pemberdayaan Masyarakat menurut Mardikanto (2017). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek Bina Manusia, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi dan pelatihan pemilahan sampah, meskipun belum merata di seluruh wilayah desa. Pada aspek Bina Usaha, program Bank Sampah telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun nilai tambah ekonomi masih terbatas karena keterbatasan keterampilan kewirausahaan dan akses pemasaran. Pada aspek Bina Lingkungan, terjadi perubahan perilaku masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kebersihan lingkungan, walaupun masih terdapat kendala dalam konsistensi pemilahan sampah.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Desa, Pengelolaan, Bank Sampah.

Abstract

This study discusses the Empowerment of Village Governments in Waste Management through Waste Banks in Sariwangi Village, Parongpong District, West Bandung Regency. The issues are characterized by low public awareness of waste sorting, limited management facilities, and an increase in the volume of household waste each year. To overcome these problems, the Sariwangi Village Government initiated waste management based on Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, Government Regulation Number 81 of 2012 concerning Household Waste Management, and West Bandung Regency's regional policy on environmental management. This study uses Mardikanto's (2017) theory of Community Empowerment Efforts. The

research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation.

The results show that in terms of Human Development, the village government has conducted socialization and training on waste sorting, although it has not been evenly distributed throughout the village. In terms of Business Development, the Waste Bank program has provided economic benefits to the community, but the economic added value is still limited due to limited entrepreneurial skills and marketing access. In terms of Environmental Development, there has been a change in community behavior, marked by improved environmental cleanliness, although there are still obstacles in terms of consistency in waste sorting. Meanwhile, in terms of Institutional Development, the organizational structure of the Waste Bank has been established and is functioning, but it is not yet optimally supported by village regulations and a sustainable coordination system. The conclusion of this study shows that community empowerment in waste management through the Waste Bank in Sariwangi Village has been able to encourage the community empowerment process, but it has not been optimal in all aspects of empowerment.

Keywords: Empowerment, Community, Village, Management, Waste Bank.

PENDAHULUAN

Permasalahan pencemaran lingkungan dewasa ini telah berkembang menjadi isu multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan degradasi kualitas lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, keberlanjutan pembangunan, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Salah satu faktor utama yang berkontribusi signifikan terhadap pencemaran lingkungan adalah meningkatnya volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, urbanisasi, serta gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif telah menyebabkan peningkatan timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai. Akibatnya, sampah masih dipersepsikan sebagai limbah yang tidak bernilai dan cenderung dibuang tanpa pengelolaan yang tepat, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara.

Dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak optimal semakin terasa ketika sistem pengelolaan yang diterapkan masih berorientasi pada pendekatan konvensional, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pendekatan ini tidak hanya membutuhkan biaya yang besar dan lahan yang luas, tetapi juga tidak mampu menyelesaikan permasalahan sampah secara berkelanjutan. Ketimpangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan kemampuan

pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah menyebabkan akumulasi sampah di lingkungan permukiman, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan alternatif strategi pengelolaan sampah yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi sebagai landasan dalam pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Kebijakan tersebut secara implisit menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, dalam upaya pengelolaan sampah yang terpadu.

Dalam konteks pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang luas bagi desa untuk mengelola potensi dan permasalahan lokal secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan sampah. Undang-undang ini menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu pilar utama pembangunan desa, dengan menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Melalui kerangka hukum ini, desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, serta didukung oleh pembiayaan yang bersumber dari APBDes dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

Salah satu model pengelolaan sampah yang sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat desa adalah program bank sampah. Bank sampah merupakan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang

mengadopsi prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R), dengan mekanisme yang menyerupai sistem perbankan. Dalam sistem ini, masyarakat berperan sebagai nasabah yang menabung sampah anorganik yang telah dipilah, kemudian memperoleh imbalan dalam bentuk nilai ekonomi. Model ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengurangan timbulan sampah, tetapi juga sebagai instrumen edukasi lingkungan, perubahan perilaku masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga.

Di Kabupaten Bandung Barat, program bank sampah berkembang sebagai salah satu strategi pengelolaan sampah yang didorong oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, timbulan sampah di wilayah ini mencapai 725.690 m³ per hari, dengan cakupan pelayanan pengelolaan sampah yang masih terbatas. Hingga saat ini tercatat sebanyak 32 unit bank sampah yang tersebar di 15 kecamatan, dengan kemampuan pengurangan sampah mencapai lebih dari 44 ton per bulan dan melibatkan ribuan kepala keluarga. Meskipun demikian, keberadaan bank sampah tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan sampah secara menyeluruh, karena implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan, operasional, maupun partisipasi masyarakat.

Permasalahan tersebut tercermin pula dalam pengelolaan bank sampah di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Meskipun telah berdiri Bank Sampah Berkah sejak tahun 2018 sebagai inisiatif swadaya masyarakat, permasalahan sampah di desa ini masih belum tertangani secara optimal. Pengelolaan sampah masih didominasi oleh paradigma lama yang berorientasi pada pembuangan ke TPA, sementara penerapan prinsip 3R belum berjalan secara konsisten. Keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya kelembagaan pengelola, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas program bank sampah.

Dalam kondisi tersebut, peran pemerintah desa menjadi sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses pemberdayaan

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah mencakup upaya peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat, serta penguatan kelembagaan lokal agar mampu mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek aktif yang terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Desa Sariwangi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pemberdayaan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah di Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sampah, serta kontribusi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, makna, dan dinamika pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat secara langsung di lapangan. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan informasi, analisis, dan deskripsi mengenai praktik pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Desa Sariwangi dalam pengelolaan sampah, khususnya melalui penerapan bank sampah sebagai instrumen pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pemilihan metode ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Creswell,

yang menekankan pada proses, konteks, dan pemaknaan terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif ini, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument). Peneliti berperan secara langsung sebagai pewawancara, pengamat, dan pengumpul dokumentasi. Selama proses penelitian, peneliti melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam, serta pengumpulan berbagai dokumen yang relevan. Peneliti juga melakukan observasi partisipatif aktif untuk memahami konteks sosial dan dinamika yang terjadi dalam pengelolaan bank sampah di tingkat desa. Selain itu, peneliti secara reflektif menyadari dan mengidentifikasi latar belakang, nilai, serta potensi bias pribadi yang dapat memengaruhi interpretasi data, sehingga proses analisis dilakukan secara hati-hati dan objektif.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. Penelitian dilaksanakan di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Sariwangi memiliki program bank sampah yang telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai permasalahan dalam implementasinya, sehingga relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, lokasi penelitian yang relatif mudah dijangkau memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data secara intensif dan berkelanjutan.

Penentuan informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu dan relevansi dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparatur pemerintah Desa Sariwangi, pengelola bank sampah, serta masyarakat yang terlibat atau terdampak langsung oleh program bank sampah. Aparatur desa dipilih karena memiliki peran dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pengelola bank sampah dipilih karena memahami proses teknis pengelolaan sampah, sementara masyarakat dipilih untuk memperoleh perspektif mengenai tingkat partisipasi dan manfaat program bank sampah dalam kehidupan sehari-hari.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi terkait kebijakan, peran pemerintah desa, mekanisme pengelolaan bank sampah, serta tingkat partisipasi masyarakat. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan sampah dan pelaksanaan program bank sampah di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan desa, laporan kegiatan, serta data lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh dari lapangan dirangkum dan dipilah untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar temuan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan diverifikasi dengan data lapangan untuk memastikan keakuratan temuan penelitian.

Untuk menjamin keabsahan dan validitas data, penelitian ini menerapkan beberapa strategi, yaitu triangulasi, member check, dan reliabilitas. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi hasil penelitian kepada informan guna memastikan kesesuaian antara data yang disajikan dengan pengalaman dan pandangan informan. Reliabilitas penelitian dijaga melalui konsistensi prosedur penelitian, teknik analisis data, serta penyajian deskripsi yang mendalam (*thick description*) mengenai konteks, partisipan, dan fenomena yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dengan waktu penelitian berlangsung sejak Juli hingga November 2024. Rentang waktu tersebut digunakan untuk studi

pustaka, penelitian awal, pengumpulan data lapangan, hingga penyusunan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH DI DESA SARIWANGI KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Desa Sariwangi

Pembahasan ini difokuskan pada analisis hasil penelitian mengenai pemberdayaan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Analisis dilakukan secara sistematis dengan merujuk pada teori pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2017) yang meliputi empat dimensi utama, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana peran pemerintah desa dalam mendorong proses pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah.

Bina Manusia dalam Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah

Pada dimensi bina manusia, pemberdayaan diarahkan pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok masyarakat dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sariwangi telah berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah dan pemilahan sampah rumah tangga. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pertemuan warga, kader lingkungan, serta pengurus bank sampah.

Namun demikian, implementasi bina manusia belum berjalan secara optimal dan merata. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada kelompok tertentu, terutama warga yang telah menjadi nasabah aktif bank sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat masih berada pada tahap awal. Secara teoritis, Mardikanto menekankan bahwa bina manusia merupakan fondasi utama dalam pemberdayaan, karena keberhasilan program sangat ditentukan oleh

kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keterbatasan intensitas dan jangkauan pembinaan menjadi faktor penghambat optimalisasi program bank sampah di Desa Sariwangi.

Bina Usaha dalam Program Bank Sampah

Bina usaha dalam konteks bank sampah di Desa Sariwangi diwujudkan melalui upaya menciptakan nilai ekonomi dari sampah anorganik yang dikumpulkan oleh masyarakat. Program tabungan sampah yang diterapkan Bank Sampah Berkah telah memberikan insentif ekonomi langsung kepada masyarakat, meskipun dalam jumlah yang relatif terbatas. Sampah yang disetorkan ditimbang dan dikonversikan menjadi nilai tabungan yang dapat dicairkan dalam bentuk uang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari program bank sampah belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya volume sampah yang disetor secara rutin, fluktuasi harga jual sampah, serta belum berkembangnya usaha lanjutan berbasis daur ulang. Secara teoritis, bina usaha menuntut adanya pengembangan keterampilan kewirausahaan, akses pasar, serta dukungan permodalan. Keterbatasan pada aspek tersebut menyebabkan bank sampah di Desa Sariwangi masih berfungsi sebagai pengelola sampah, belum sebagai unit usaha produktif yang berkelanjutan.

Bina Lingkungan sebagai Dampak Program Bank Sampah

Pada dimensi bina lingkungan, program bank sampah di Desa Sariwangi menunjukkan dampak yang relatif positif. Hasil penelitian mengindikasikan adanya peningkatan kebersihan lingkungan dan berkurangnya penumpukan sampah di beberapa wilayah yang aktif mengikuti program bank sampah. Masyarakat mulai terbiasa memilah sampah anorganik dan tidak sepenuhnya membuang sampah ke lingkungan sekitar.

Meskipun demikian, perubahan perilaku tersebut belum bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Masih ditemukan masyarakat yang belum konsisten dalam melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Hal ini menunjukkan bahwa bina lingkungan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai budaya masyarakat. Dalam perspektif pemberdayaan, bina lingkungan tidak hanya berorientasi pada kondisi fisik lingkungan, tetapi juga pada perubahan sikap

dan perilaku sosial masyarakat terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, kesinambungan program dan penguatan edukasi lingkungan menjadi faktor penting untuk memperkuat capaian bina lingkungan.

Bina Kelembagaan dalam Pengelolaan Bank Sampah

Bina kelembagaan menjadi aspek penting dalam menjamin keberlanjutan program bank sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Berkah di Desa Sariwangi telah memiliki struktur organisasi yang jelas, meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan petugas operasional. Struktur ini menunjukkan adanya upaya pembentukan kelembagaan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Namun, secara kelembagaan bank sampah belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan dan regulasi desa. Dukungan pemerintah desa masih bersifat fasilitatif dan belum dituangkan dalam regulasi desa yang mengatur secara khusus pengelolaan bank sampah. Selain itu, sistem koordinasi dan monitoring belum dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Mardikanto, kelembagaan yang kuat memerlukan aturan yang jelas, pembagian peran yang tegas, serta dukungan kebijakan yang konsisten. Kelemahan pada aspek tersebut berpotensi menghambat keberlanjutan program bank sampah di Desa Sariwangi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori peran pemerintah menurut Gade Diva (2009), yang mencakup peran sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat telah menjalankan perannya dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara struktural dan normatif. Temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan dan program menunjukkan bahwa penanganan PMKS telah memiliki dasar kebijakan yang jelas, mekanisme kelembagaan yang terbentuk, serta program-program yang dirancang untuk menjawab permasalahan kesejahteraan sosial di daerah. Namun demikian, efektivitas

pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan yang memengaruhi capaian program secara optimal.

Dalam perannya sebagai regulator, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat telah menyusun dan melaksanakan kebijakan serta pedoman penanganan PMKS yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan program rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial bagi PMKS. Keberadaan regulasi ini memberikan arah dan kepastian bagi pelaksanaan program di tingkat daerah. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peran regulator belum sepenuhnya optimal karena regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik serta dinamika permasalahan PMKS di tingkat lokal. Selain itu, proses sosialisasi kebijakan kepada pelaksana di tingkat kecamatan dan desa serta kepada masyarakat belum dilakukan secara merata, sehingga berdampak pada perbedaan pemahaman dan konsistensi implementasi kebijakan di lapangan.

Selanjutnya, dalam perannya sebagai fasilitator, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat telah berupaya menyediakan dukungan anggaran, sarana prasarana, serta fasilitasi teknis guna mendukung pelaksanaan penanganan PMKS. Peran ini diwujudkan melalui berbagai program bantuan sosial, kegiatan rehabilitasi sosial, serta pendampingan yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari sisi ketersediaan anggaran maupun kapasitas sumber daya manusia, masih menjadi kendala utama dalam optimalisasi peran fasilitator. Selain itu, ketimpangan kapasitas dan kesiapan pelaksana di tingkat kecamatan dan desa turut memengaruhi belum meratanya kualitas layanan dan fasilitasi sosial yang diterima oleh PMKS di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Sementara itu, peran Dinas Sosial sebagai katalisator tercermin dalam upayanya untuk mempercepat terbangunnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan PMKS. Dinas Sosial berperan sebagai penghubung

antara berbagai aktor, seperti Satpol PP, pemerintah kecamatan dan desa, serta pendamping sosial, sehingga pendekatan penanganan PMKS tidak hanya berfokus pada aspek penegakan ketertiban, tetapi juga pada pemulihan dan kesejahteraan sosial. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran katalisator ini belum berjalan secara optimal karena belum terintegrasinya sistem data PMKS antarinstansi serta koordinasi lintas sektor yang masih bersifat insidental dan reaktif. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan PMKS belum sepenuhnya dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat telah menjalankan peran sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam penanganan PMKS sesuai dengan kerangka teori Gade Diva (2009). Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan ketiga peran tersebut masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal adaptivitas kebijakan terhadap kondisi lokal, pemerataan dan peningkatan kapasitas sumber daya, serta penguatan koordinasi lintas sektor yang terintegrasi. Penguatan aspek-aspek tersebut menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampak kebijakan penanganan PMKS di Kabupaten Bandung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

Abdullah, Syukur. M (1988). *Perkembangan Studi Implementasi*. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta.

A. G Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anwas, M oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: CV Alfabeta

Craswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gunawan Sumodiningrat, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS* Gramedia, Jakarta : Pustaka Utama.

Harry Hikmat, 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung : Humaniora.

Mardikanto, Totok. 2003. Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pembangunan, dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. IPB Press, Bogor.

Mardikanto, Tatok dan Powerwoko Soebianto. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan. Bandung: Alfabeta Bandung.

Mardikanto, T., & Poerwoko Soebianto. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik (Edisi Revisi) (Keempat). Alfabeta.

Mardikanto, Totok Poerwoko, Soebiato, 2019. Pemberdayaan masyarakat: Dalam perspektif kebijakan publik. Bandung: Alfabeta

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis (3rd ed.). Sage.

Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Neuman, Lawrence W. 2006. Social Research Methods. United Kingdom: Pearson

Kadir, Abdul. 2015. Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik, CV.Dharma Persada- Dharmasraya

Rosidin, Utang. 2019. Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah. Bandung: CV Pustaka Setia

Suharto, Edi. 2017. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Medika

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Alfabeta.

Suhendra, K. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Yabbar, R., & Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa : Dari Peraturan di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Penribit Pustaka.

II. JURNAL.

Solihin, M. M., Muljono, P., Sadono, D. (2019). Partisipasi Ibu Rumah Tangga dalam Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Desa Ragajaya , Bojonggede - Bogor Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan* Vol. 17 Issue 3 (2019) : 388-398

Soraya ,Dea Alvi. 2022. Persentase pengurangan sampah di Kota Bandung, *Republika* (<https://www.republika.co.id/berita/rinqa6330/Kota-bandung-hanya-mampu-kurangi-9-persen-sampah>). Diakses pada tanggal 7 desember 2022

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2019-2025

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah